



## ISIAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

---

### JUDUL

Tuliskan judul penelitian

Kebijakan Asimetris Sebagai Model Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Ekonomi Pariwisata di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas

### RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Kawasan perbatasan (frontier) memiliki posisi strategis bagi sebuah negara karena bermakna makna “daerah depan”, daerah “etalase” atau beranda depan sebagai manifestasi kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Ada 2 (dua) kecamatan Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia, yakni kecamatan Paloh dan Sajingan Besar merupakan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) cenderung terisolasi secara geografis, sarana dan prasarana kurang, ekonomi tertinggal, rawan ancaman keamanan dan lingkungan. Padahal perbatasan berfungsi sebagai militer-strategis, konstitutif, identitas nasional, kesatuan nasional, dan pembangunan nasional. Salah satu masalah di perbatasan adalah kurangnya infrastruktur yang berdampak pada pembangunan ekonomi dan pariwisata. Infrastruktur adalah salah satu faktor penting Pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan perhatian khusus dan afirmatif atau desentralisasi asimetris. Kehadiran negara di kawasan perbatasan dipandang signifikan melalui kebijakan yang memihak melalui implementasi UU No.43/2008, UU No.23/2014, UU No.1/2022 dan Inpres No.1/2021.

Ada ketimpangan antara pentingnya fungsi ideal perbatasan (das solen) bagi kelangsungan negara dan kondisi nyata perbatasan yang serba terbatas (das sein). Hal ini menjadi alasan **urgensi** kebijakan asimetris, afirmatif dan khusus pembangunan kawasan perbatasan Sambas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, menjadi isu luar biasa dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Kebijakan asimetris menjadi solusi alternatif akselerasi pembangunan infrastruktur fisik perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara melalui instrumen politik, administrasi dan finansial.

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengidentifikasi isu-isu infrastruktur, ekonomi dan pariwisata dan menganalisis hubungan kebijakan asimetris dengan akselerasi pembangunan infrastruktur dan dampak ekonomi dan pariwisata di perbatasan Sambas.

Untuk melakukan penelitian ini, **metode** yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis deskriptif-ekplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam dan pengamatan sesuai TKT level 2. Adapun **target luaran** penelitian ini berupa analisis

kebijakan asimetris sebagai model alternatif percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi dan pariwisata perbatasan di Kabupaten Sambas. Luaran berupa artikel akan dipublikasikan pada jurnal nasional sinta 2

## KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Model\_Akselerasi; Pembangunan\_Infrastruktur; Ekonomi\_Pariwisata; Perbatasan\_Sambas

## PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

1. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
2. Pendekatan pemecahan masalah
3. *State of the art* dan kebaruan
4. Peta jalan (*road map*) penelitian 5 tahun kedepan
5. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver

### 1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Sejak disahkan Undang-Undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (1), pembangunan perbatasan menjadi salah satu prioritas. Paradigma baru pengelolaan perbatasan telah dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan yang berorientasi *inward-looking* menjadi *outward-looking*. Pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya bersifat keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan. Selain itu, makna perbatasan berubah dari halaman belakang menjadi halaman depan negara atau etalase bangsa.

Perbatasan negara memiliki peran penting dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, mempercepat kesejahteraan, menandakan batas-batas kedaulatan negara secara teritorial, dan menjadi barometer ketahanan nasional di segala bidang. Fungsi perbatasan negara sebagai Berikut fungsi militer-strategis, fungsi ekonomi, fungsi konstitutif, fungsi identitas nasional dan fungsi kepentingan domestic, kesatuan nasional, dan pembangunan nasional (2,3). Guichonnet & Raffestin menyebutkan 3 fungsi yakni fungsi legal, fungsi kontrol, dan fungsi fiscal (4). Sesuai UU No.43/2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan yang merupakan wilayah yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, menjadi sangat penting dalam pembangunannya (5)

Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bertujuan untuk (a) menjaga keutuhan daerah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dalam konteks internasional (6,7)

Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan Nawa Cita sebagai visi pemerintahannya, dimana Nawa Cita ke-3 berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu amanat dalam RPJMN 2015-2019. Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama karena merupakan daerah pinggiran. Oleh karena itu, agar menghasilkan format pemerintahan yang efektif dan efisien baik pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, maka diperlukan desentralisasi asimetris. Implementasinya adalah Inpres No.1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana korelasi antara kebijakan asimetris dalam Pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi pariwisata di Kabupaten Sambas?

## 2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Pemerintah Indonesia menggunakan tiga pendekatan dalam pengelolaan perbatasan yakni pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Untuk implementasi pendekatan tersebut, pemerintah melakukan perlakuan khusus dan afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perbatasan yakni kebijakan asimetris. Kebijakan ini dilakukan menggunakan instrumen administrasi, politik, dan fiskal menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kawasan perbatasan. Asimetris administrasi meliputi peningkatan kapasitas pemerintah daerah; asimetris politik berupa keberpihakan dan dukungan kekuasaan; asimetris finansial merupakan dukungan anggaran yang memadai untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan.



Gambar 1. Pemecahan Masalah

Sumber: Peneliti, 2025

## 3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Asimetris berarti memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda dari daerah lain. Kebijakan asimetris adalah tingkat ukuran perlakuan yang berbeda dalam interaksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan sebagai perekat untuk menjaga stabilitas politik dan integritas wilayah negara(8). Beberapa ciri utamanya adalah perbedaan atau pengecualian perlakuan; perbedaan kecepatan dan ukuran dari sebuah kebijakan; perbedaan dosis atau kadar keberpihakan terhadap kebijakan yang sama kepada sasaran yang berbeda; bentuk modifikasi dari simetris (ada pembanding); sebuah diskresi kebijakan, pengecualian/penyalahgunaan kewenangan dari pola simetrisnya(9). Kebijakan asimetris dibagi dalam tiga level yaitu asimetri politik, asimetri administratif, dan asimetri fiskal (8).

Bentuk distribusi kekuasaan asimetris bertujuan untuk mengatasi yakni persoalan politik termasuk keunikan dan perbedaan budaya; dan persoalan teknokratis-manajerial, yakni keterbatasan suatu daerah dalam melaksanakan fungsi dasar pemerintahan (10). Tujuan lain untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat daya saing ekonomi global, membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik pemerintah daerah, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi pemberlakuan kebijakan asimetris diantaranya untuk efisiensi anggaran negara, mendekatkan Pemerintah Daerah dalam pelayanan dasar publik dan pembangunan sosial ekonomi, dan penghormatan terhadap konstitusi yang mengakui perbedaan karakteristik dalam suatu negara.

#### **4. Instrumen Kebijakan Asimetris**

Instrumen kebijakan publik merupakan serangkaian teknik yang digunakan otoritas pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya dalam upaya memastikan dukungan dan memberikan dampak (atau mencegah) perubahan sosial(11). Tujuan instrumen kebijakan untuk mendorong perubahan (atau menghindari perubahan) dengan cara tertentu, merangsang inovasi, mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi(12). Instrumen kebijakan dapat berupa lembaga dan tata cara negara untuk menjadikan alat yang disediakan oleh suatu masyarakat kepada para pemimpinnya untuk penyelesaian masalah public(13), dapat berupa hukum, regulasi, dan program(14,15), mandate, bujukan, pengembangan kapasitas, dan perubahan sistem(16), komunitas(17), institusi(18), regulasi, sumber ekonomi, dan informasi(19) ilmu pengetahuan(20), Instrumen regulasi, Instrumen berbasis pasar, Instrumen berbasis informasi(21).

#### **4. Pembangunan Ekonomi Pariwisata Kawasan Perbatasan**

Dalam perspektif ekonomi, pembangunan adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapabilitas dengan memunculkan nilai-nilai inti pembangunan adalah sustenance, self-esteem, dan freedom (22). Percepatan pembangunan infrastruktur dapat membuka akses lalu lintas orang dan barang sehingga meningkatkan pariwisata, pendapatan dan produktivitas. Pembangunan sebagai kenyataan fisik, sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik (22)

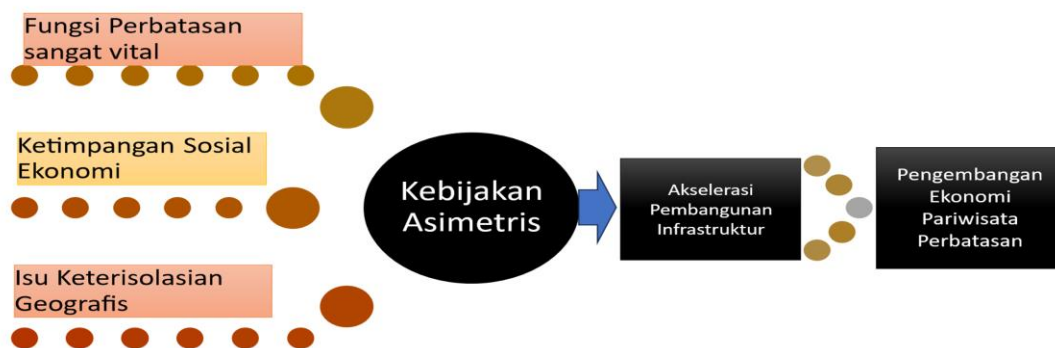
Menurut Hall and Williams (2019), pariwisata adalah “aktivitas mengunjungi tempat- tempat untuk bersenang-senang” sebagai pergerakan orang-orang di luar tempat tinggalnya sendiri (23). Lipsey menjelaskan bahwa ekonomi merupakan studi tentang penggunaan sumber daya yang langka untuk

memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (24). **Ekonomi pariwisata** adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Fokus utamanya adalah bagaimana sektor pariwisata menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, pertumbuhan lokal, dan kesejahteraan masyarakat melalui kunjungan wisatawan. Jadi, Ekonomi pariwisata adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dampak pariwisata terhadap perekonomian, termasuk perolehan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengaruhnya terhadap industri local (25).

Jadi, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa kebijakan asimetris (regulasi, fiscal, infrastruktur) dapat menjadi akselerasi Pembangunan ekonomi pariwisata sehingga berdampak pada pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan industry local.

## 5. Kebaruan

Selama ini, desentralisasi asimetris hanya diimplementasikan di beberapa provinsi dengan berbagai alasan politik, keamanan, ekonomi, sejarah, dan sosio-kultural seperti Daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat (26–29). Merujuk pada argumentasi tersebut, maka kebaruan dalam penelitian ini adalah kebijakan asimetris dapat diadopsi pada Daerah Khusus Perbatasan. Argumentasinya, perbatasan sebagai beranda depan negara memiliki fungsi strategis untuk kelangsungan hidup negara, namun secara infrastruktur dan ekonomi tertinggal

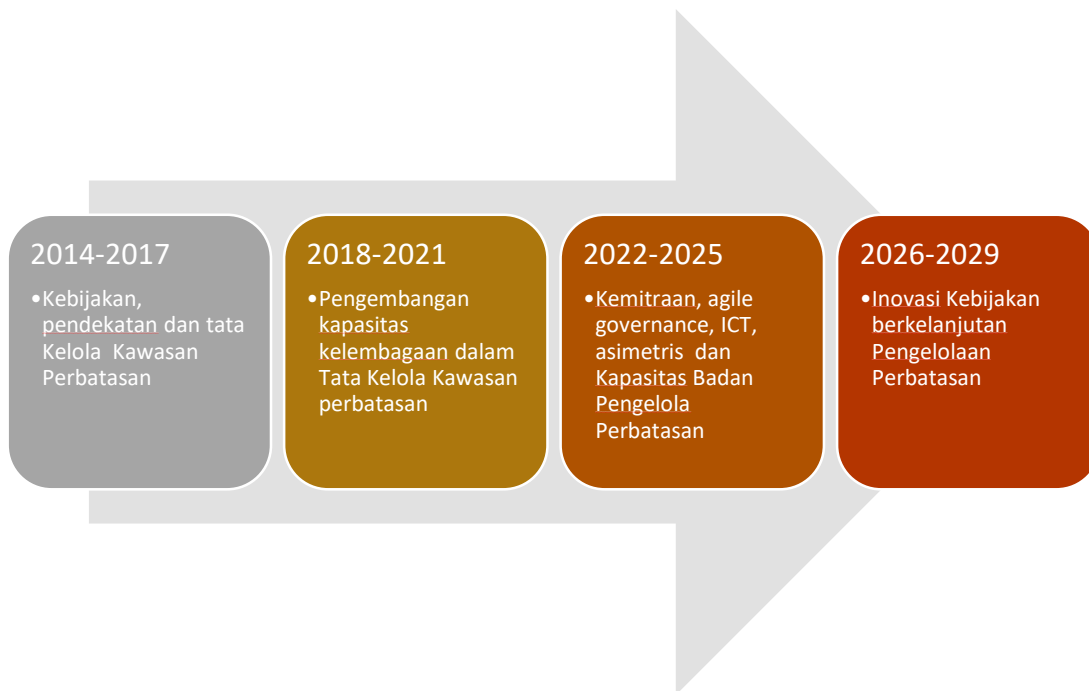


Gambar 2. State of the Art dan Kebaruan

Sumber: Peneliti, 2025

## 6. Peta jalan Penelitian

Ketua tim peneliti dan anggota tim memiliki pengalaman akademis dan empiris bidang kebijakan, pengembangan kapasitas pengelolaan perbatasan, tata kelola kolaboratif dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan perbatasan serta pariwisata. Beberapa publikasi artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini dapat pijakan untuk penelitian berikut (10,30–40)



**Gambar : Peta Jalan Penelitian**

**Sumber: Peneliti, 2025**

## METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### 1. Pendekatan Penelitian

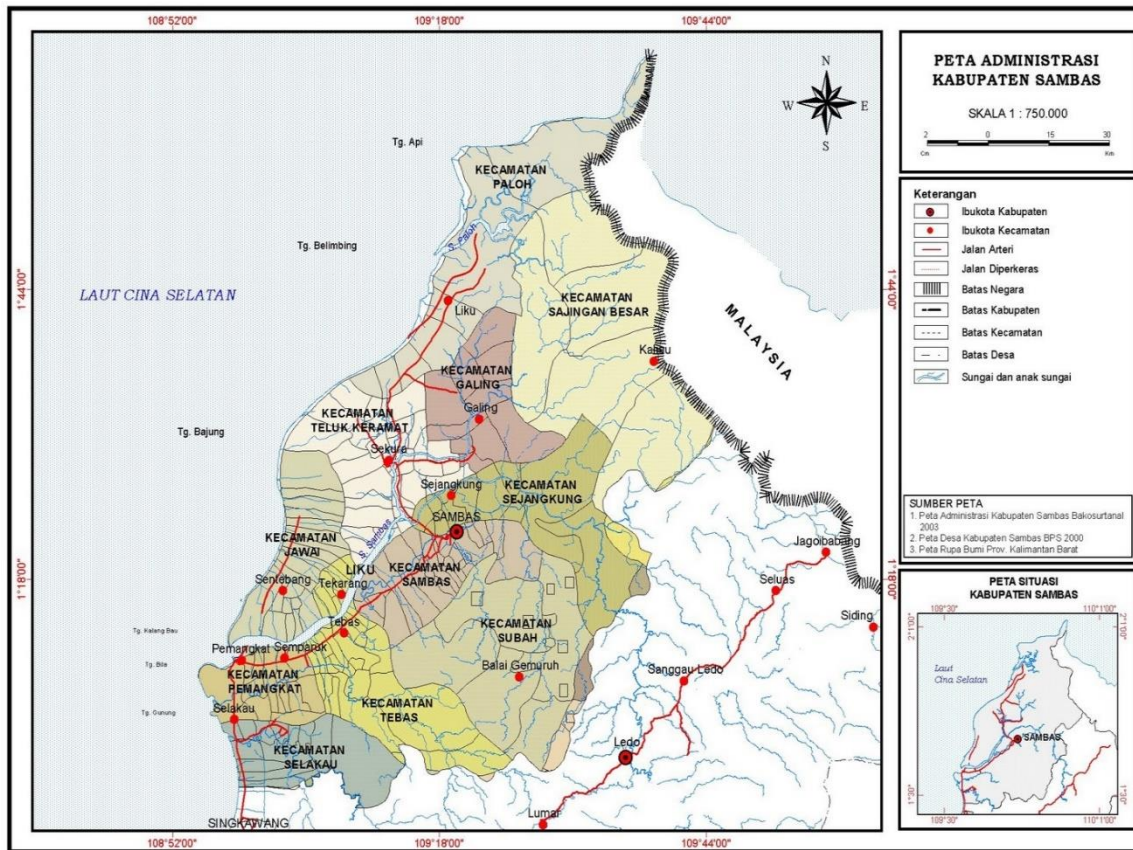
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan “*complex holistic picture in natural setting*” (41). Pendekatan ini akan menguraikan (a) makna tertentu dari fenomena, (b) memahami dan mendalami konteks tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (d) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan kausalitas dan (f) mendeskripsikan pola-pola. (41,42). Jenis penelitian ini adalah deskriptif-ekplanatif karena akan menggambarkan dan menganalisis pola hubungan kebijakan asimetris dengan instrumen-instrumennya dengan percepatan Pembangunan infrastruktur sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sambas.

### 2. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian ini adalah kebijakan asimetris sebagai model alternatif untuk percepatan Pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Sambas. Pada gilirannya, Pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata. Secara lebih detail adalah untuk mendeskripsikan kondisi eksisting infrastruktur, kondisi social ekonomi serta pariwisata perbatasan di Sambas. Menganalisis pentingnya kebijakan asimetris untuk akselerasi Pembangunan infrastruktur dan dampak ekonomi serta pariwisatanya.

### 3. Lokasi Penelitian

Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Temajuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 4. Peta Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas

Sumber: regional.kompas.com

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Obyek penelitian berupa domain-domain yang meliputi tempat, actor dan kegiatan. Konteks tempat terkait penelitian di dua kecamatan di Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Serawak Malaysia. Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan secara snowball.

#### **4.1. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan (studi dokumen) serta studi perbandingan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan melakukan pemahaman terhadap aturan-aturan hukum yang berupa peraturan, penelitian, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan kebijakan asimetris dan instrumen-instrumen.

#### **4.2. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan Wawancara mendalam (in-dept interview) dan pengamatan di lapangan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan tatap muka langsung atau secara daring dengan informan penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri menggunakan pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. Teknik wawancara menggunakan semi-terstruktur yakni pertanyaan disusun dalam pedoman wawancara namun dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan data dan informasi serta kondisi informan.

Teknik penentuan informan melalui *snowball sampling*, yakni metode bola salju menggelinding dari jumlah sedikit kemudian makin membesar (43). Metode ini dimulai dari mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam satu rantai jaringan dan seterusnya (44). Informan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Kecamatan Temajuk, Kecamatan Sajingan Besar, dan Masyarakat di Sambas.

### **5. Analisis Data**

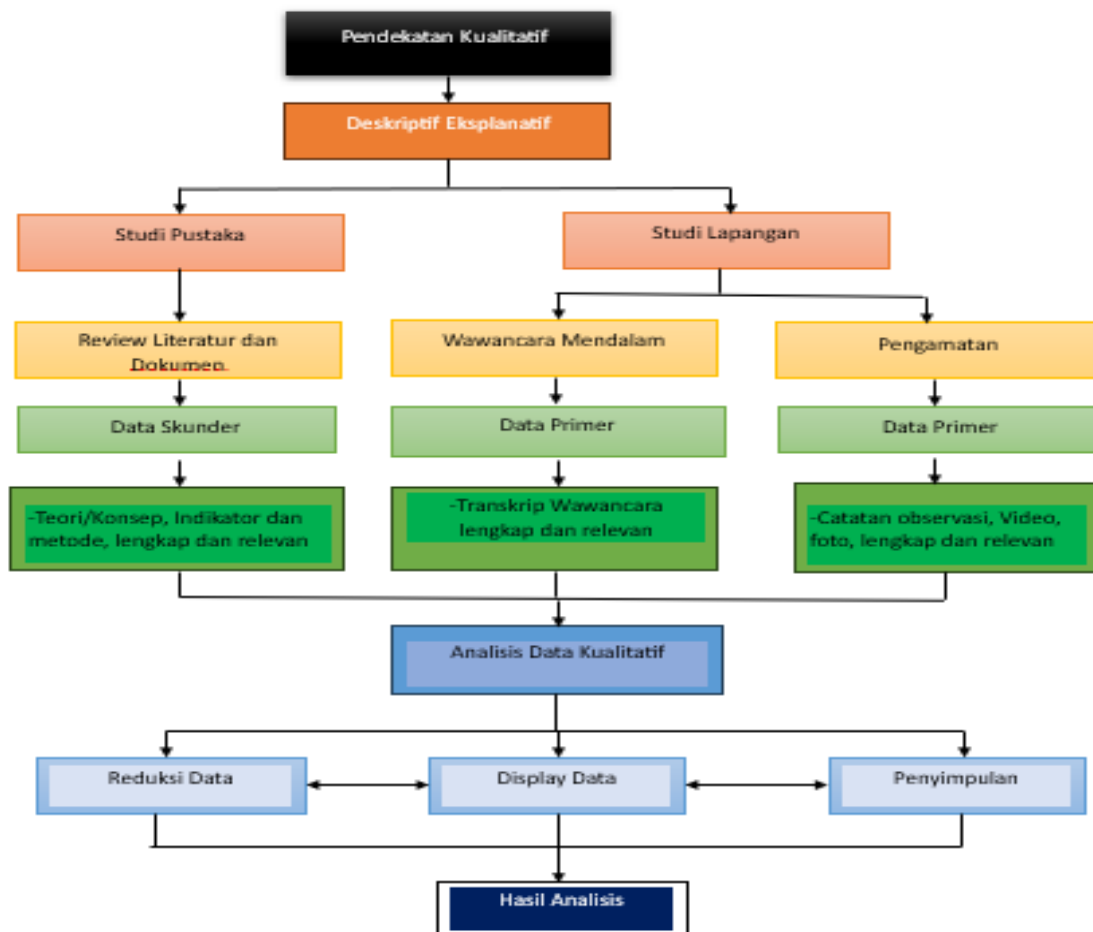
Analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain (45). Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, seperti dari wawancara, observasi, serta dokumen.

Dalam analisis data kualitatif, peneliti bekerja dengan data menggunakan pendekatan linear dan hierarkis. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut (1) mencatat dan mengumpulkan data, (2) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (3) membaca keseluruhan data; (4) memilah dan mengklasifikasi data yang relevan dan tidak relevan

dengan *coding*; (5) menghubungkan-hubungkan dan mensintesis data primer dan skunder untuk mencari pola hubungan; (6) menginterpretasi data atau memaknai data untuk mendapatkan temuan. (41)

## 6. Keabsahan Data

Tujuan uji validitas adalah supaya hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti mengecek keabsahan data yang membawa implikasi terhadap validitas temuan yang dihasilkan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah *pertama*, menggunakan triangulasi yakni peneliti berupaya mengakses sumber data yang bervariasi (triangulasi data) baik dari buku, jurnal, peraturan yang relevan, kebijakan pemerintah, data dari instansi resmi, dan nara sumber. Peneliti juga membandingkan temuan data yang diperoleh dengan metode tertentu (triangulasi metode), yakni studi dokumen, wawancara dan observasi.



Gambar 5. Tahapan Penelitian

Sumber: Peneliti, 2025

**Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah** model akselerasi Pembangunan infrastruktur di Kawasan perbatasan Sambas melalui implementasi kebijakan asimetris. Pembangunan infrastruktur menjadi factor penting untuk membuka akses kawasan perbatasan yang terisolasi, sehingga dapat meningkatkan arus orang dan barang. Pada gilirannya meningkatkan ekonomi pariwisata dan kesejahteraan Masyarakat perbatasan.

**Tabel.1. Kegiatan dan Indikator**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	Latar Belakang, Identifikasi Masalah, State of the art dan kebaruan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersusunnya proposal penelitian yang layak</li><li>- Tersusunnya urgensi penelitian yang tajam</li><li>- Tersusunnya rumusan masalah yang signifikan untuk diteliti</li><li>- Ada kebaruan dalam penelitian</li></ul>
2	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersusunnya desain penelitian yang tepat</li><li>- Teknik pengumpulan data yang tepat</li><li>- Teknik analisis tepat</li><li>- Teknik pemilihan informan tepat</li><li>- Terusunnya Panduan Wawancara</li></ul>
3	Pelaksanaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengajuan ijin penelitian</li><li>- Persetujuan ijin penelitian</li><li>- Pengumpulan data harus relevan dan sesuai jadwal</li><li>- Penggunaan anggaran sesuai rencana</li><li>- Pengisian log kegiatan</li></ul>
4	Pengolahan dan Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data lengkap dan relevan</li><li>- Klasifikasi Data tepat</li><li>- Reduksi Data</li><li>- Penyajian Data</li><li>- Memberi makna dan menghubungkan data</li><li>- Menyimpulkan hasil analisis</li></ul>
5	Analisis Kebijakan Asimetris dan Model Akselerasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identifikasi masalah infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata di Sambas</li><li>- Identifikasi instrumen-instrumen kebijakan asimetris</li><li>- Analisis kebijakan asimetris, percepatan Pembangunan infrastruktur dan</li></ul>

		peningkatan ekonomi pariwisata di Sambas
6	Disemani hasil Penelitian dan luaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya laporan penelitian</li> <li>- Terpublikasinya artikel pada jurnal nasional Sinta 2</li> </ul>

## JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, ditulis dengan mengisi langsung tabel berikut dan diperbolehkan menambahkan baris sesuai banyaknya jenis kegiatan.

No.	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1.	Finalisasi Proposal dan Perijinan						
2.	Review Literatur						
3.	Penyusunan Pedoman Wawancara						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Display Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Laporan						
8.	Penulisan dan submit artikel						

## LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Tuliskan target luaran wajib dan tambahan (jika ada) yang akan dihasilkan.

No.	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Target Capaian
1.	Jurnal Nasional Sinta 2	Artikel	published
2.	-		
dst.			

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

**Total RAB: Rp. 15.150.000**

Jenis Pembelajaan	Komponen	Item	Kuantitas	Biaya Satuan	Total
Belanja Bahan	ATK	Paket ATK	1	250.000	250.000
Belanja Bahan	Bahan penelitian (habis pakai)	-			

Pengumpulan Data	Honor pembantu peneliti	2 orangx5	10	100.000	1.000.000
Pengumpulan Data	FGD	-			
Pengumpulan Data	Transport	2 orangx2	4	1.000.000	4.000.000
Pengumpulan Data	Sewa kendaraan	3 hari	3	500.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Konsumsi	2 orgx3x5	30	50.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Sewa Hotel	3	300.000	900.000
Analisis Data	Honor pengolah data	2x5 hari	10	200.000	2.000.000
Analisis Data	Honor narasumber	1 orang	1	1.000.000	1.000.000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	5 harix1 ruang	5	300.000	1.000.000
Pelaporan penelitian	Honor administrasi peneliti	2x5 hari	10	50.000	500.000
Biaya Luaran	Biaya publikasi	1	1	500.000	500.000
Lainnya	Biaya pendaftaran HKI				

## HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai meliputi data dan hasil analisis. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Tabel 1. Unsur dan Bentuk Kebijakan Asimetris

NO	UNSUR KEBIJAKAN ASIMETRIS	BENTUK
1	Regulasi	Penyederhanaan ijin dan kebijakan afirmatif pengembangan pariwisata dan UKM Perbatasan (46)
2	Finansial	Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus dari Pusat untuk mendukung Sektor Pariwisata (47)
3	Infrastruktur	Percepatan Pembangunan PLBN, Jalan, SPAM, BTS, Dermaga (48)

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 2. Destinasi Pariwisata Perbatasan Sambas

NO	KECAMATAN	DESA	DESTINASI PARIWISATA
1.	Sajingan Besar	Kaliau	Air Terjun Riam Merasap
		Santaban	Goa Alam Santok
		Sungai Bening	Air Terjun Riam Sagat
2.	Paloh	Tanah Hitam	Pantai Tanjung Lestari
			Pantai Harapan
		Sebusus	Pantai Pulau Selimpi
			Taman Rekreasi Batu
			Bejamban

Sumber: BPS, 2024

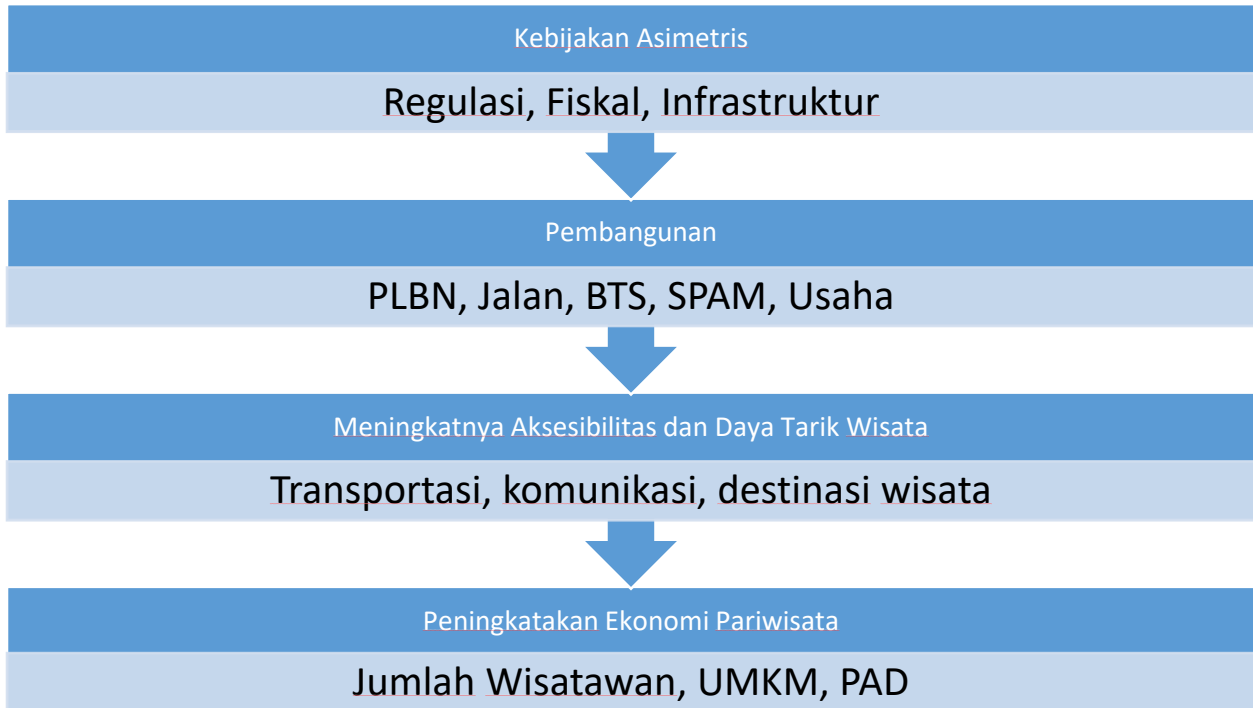
Tabel 3 Jumlah Usaha Kecil Formal tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Sajingan Besar	2	2	7	39	56
	Paloh	21	30	44	75	125

Sumber: BPS, 2025(49)

### Analisis

Untuk membuktikan bahwa kebijakan asimetris dapat meningkatkan pariwisata di perbatasan Kabupaten Sambas, kita perlu mengaitkan antara *aspek kebijakan khusus (regulasi, fiskal, dan infrastruktur)* yang diterapkan di kawasan perbatasan Sambas, dengan *indikator kemajuan pariwisata* (seperti peningkatan jumlah wisatawan, tumbuhnya UMKM pariwisata, dan berkembangnya destinasi). Hubungan konseptual dan empiris dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kebijakan asimetris merupakan kebijakan pembangunan yang *dirancang khusus untuk wilayah tertentu* karena karakteristik geografis, ekonomi, atau politiknya berbeda dari wilayah lain. Kawasan perbatasan seperti Sambas mendapatkan perlakuan khusus dalam regulasi, fiscal dan infrastruktur.

Tabel 1. Unsur dan Bentuk Kebijakan Asimetris

NO	UNSUR KEBIJAKAN ASIMETRIS	BENTUK
1	Regulasi	Penyederhanaan ijin dan kebijakan afirmatif pengembangan pariwisata dan UKM Perbatasan (46)
2	Fiskal	Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus dari Pusat untuk mendukung Sektor Pariwisata (47)
3	Infrastruktur	Percepatan Pembangunan PLBN, Jalan, SPAM, BTS, Dermaga (48)

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

### Implementasi Kebijakan Asimetris di Sambas

NO	KEBIJAKAN	IMPELEMENTASI
1	Regulasi	penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Aruk–Temajuk, pemerintah pusat memberi ruang pengembangan wisata perbatasan berbasis kearifan lokal
	Fiskal	anggaran infrastruktur dan pariwisata dari BNPP, Kemenparekraf, Kementerian PUPR, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,2 miliar untuk pariwisata (2023).
	Infrastruktur	Pembangunan PLBN Aruk dan rencana Temajuk sebagai bagian kebijakan afirmatif pusat bagi kawasan tertinggal & perbatasan; PLBN Aruk selesai dibangun pada 2022.; Jalan akses Sajingan Besar–Aruk ditingkatkan (2020–2023); Jaringan air bersih dan BTS dibangun di Temajuk dan Paloh (2024); Fasilitas destinasi (tugu batas negara, desa wisata, dermaga) dibangun untuk mendukung wisata perbatasan

### Dampak terhadap Pariwisata di Sambas

Tabel Jumlah Wisatawan

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	121.399
2	2019	683.329
3	2020	122.807
4	2021	184.970
5	2022	283.843
6	2023	429.293
7	2024	486.682
8	2025	126.482 (April 2025)

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html>

PERSENTASE JUMLAH TAMU DOMSESTIK DAN ASING

TAHUN	DOMESTIK	ASING
2020	99,75	0,25
2021	99,84	0,16
2022	99,62	0,38
2023	99,72	0,28
2024	99,65	0,35

Sumber: BPS Sambas, 2025(49)

Tabel Persentase Tingkat Penghunian/Pemakaian Kamar

TAHUN	KAMAR	TEMPAT TIDUR
2019	24,45	31,83
2020	12,71	10,36
2021	20,83	16,80
2022	21,83	16,43
2023	17,63	23,15
2024	17,45	23,77

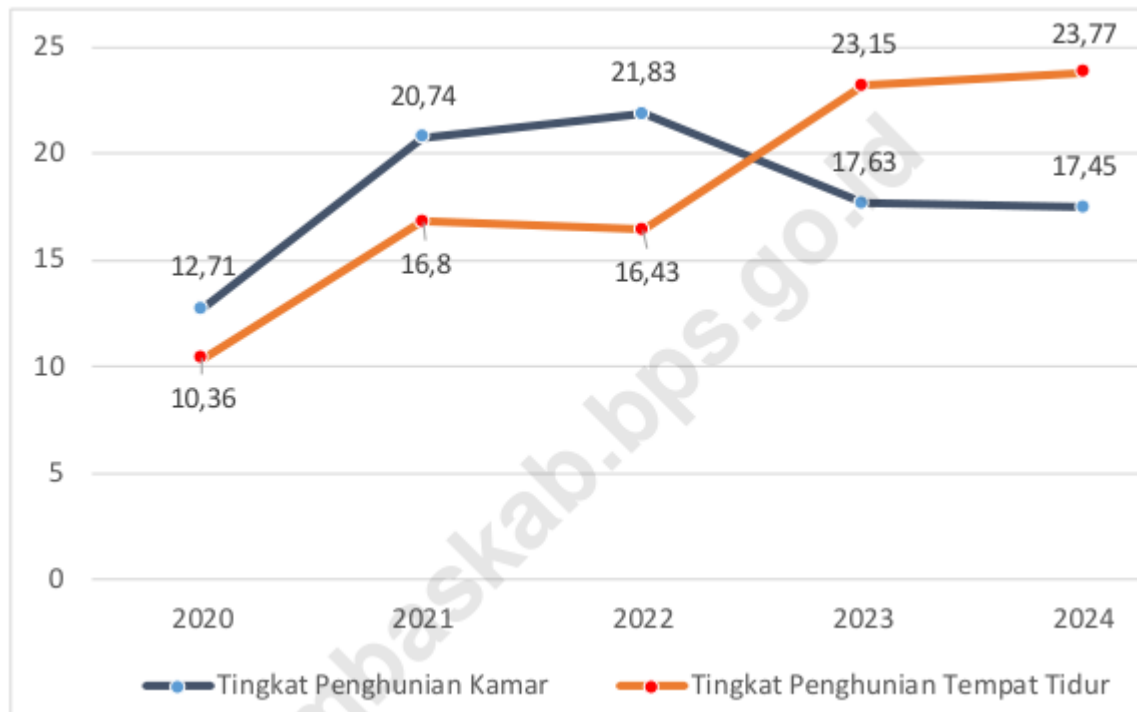
Sumber: BPS Sambas, 2025(49)

Implementasi kebijakan asimetris dalam regulasi, maka Kabupaten Sambas maka siterbitkan PP No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024) yang menetapkan Sambas sebagai Kawasan Strategis Nasional. Hal ini sangat menguntungkan karena mendapatkan perlakuan khusus untuk percepatan Pembangunan. Misalnya: prioritas anggaran dan Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan regulasi dan izin, peningkatan investasi dan infrastruktur pendukung pariwisata, sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah dan penguatan identitas dan branding kawasan perbatasan.

Dampak kebijakan asimetris ternyata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, Tingkat hunian hotel dan UMKM.

Kunjungan pariwisata mengalami kenaikan signifikan pasca pandemi yakni dari 122.807 tahun 2020 menjadi 486.682 tahun 2024 meskipun belum mencapai kunjungan tertinggi tahun 2019 yakni sebanyak 683.329.

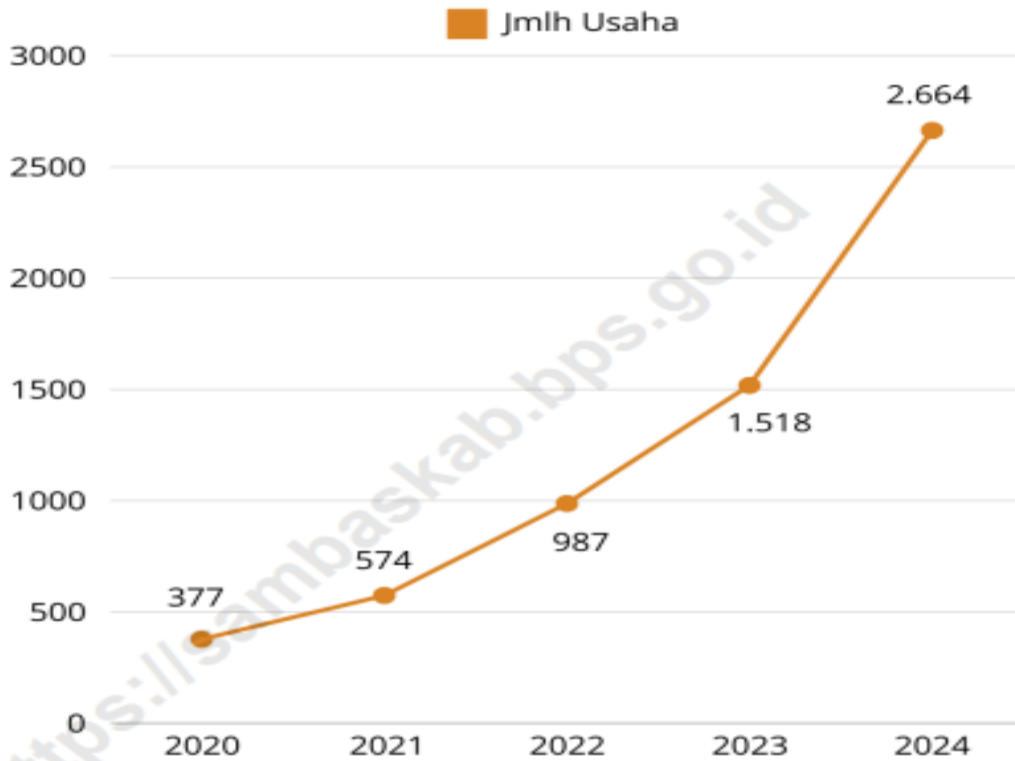
Grafik 1 Persentase Tingkat Hunian Hotel



Sumber: BPS, 2025(49)

b. Pertumbuhan UMKM Pariwisata

Grafik 2 Jumlah Usaha



Sumber: BPS, 2025(49)

Tabel Jumlah Usaha Kecil Formal tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Sajingan Besar	2	2	7	39	56
	Paloh	21	30	44	75	125

Sumber: BPS, 2025(49)

Khusus untuk usaha kuliner naik dari 5.730 (2021) → 5.807 unit (2023)

- Tenaga kerja UMKM di sektor pariwisata mencapai 7.100 orang, naik 3 tahun terakhir. (opendata.sambas.go.id)

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan

NO	TAHUN	JUMLAH
	2018	121.399
	2019	683.329
	2020	122.807
	2021	184.970
	2022	283.843
	2023	429.293
	2024	486.682
	2025	126.482 (April 2025)

<https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html>

## Kesimpulan

1. Kebijakan asimetris dalam regulasi memberikan keuntungan bagi Kabupaten Sambas menjadi Kawasan Strategis nasional
2. Kebijakan asimetris dalam bentuk Pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan pariwisata terutama di sekitar PLBN
3. Beberapa indicator unsur-unsur pariwisata mengalami peningkatan, namun belum dapat menjadi sumber utama PAD.

## STATUS LUARAN

Uraikan jenis, identitas, dan status ketercapaian setiap luaran yang dijanjikan. Jenis luaran berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal.

Luaran wajib yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal nasional terindeks Sinta 2. Status luaran wajib saat ini dalam bentuk draft artikel dengan capaian kurang lebih 30%.

## DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Sumber pustaka mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang terkini (maksimal 5 tahun terakhir). Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 [Internet]. Available from: <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
2. Wastl-Walter D. *The Ashgate Research Companion to Border Studies*. 2nd ed. New York: Taylor & Francis; 2016.
3. Brunet-Jailly E. *Borderlands: Comparing Border Security in North America and Europe*. 1st ed. the University of Ottawa Press; 2007. 404 p.
4. Guo R. *Cross-Border Resource: Management Theory and Practice*. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier B.V.; 2012.
5. Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*. 2008.
6. Mawardi MI. *Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan dan Berkelanjutan*. 1st ed. Bogor: IPB Press; 2010.
7. BNPP. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun*

- 2011-2025. 2011.
8. Veljanovski A. The model of the asymmetric fiscal decentralisation in the theory and the case of Republic of Macedonia. *Iustinianus Primus Law Rev.* 2010;1(1):23–43.
  9. Kementerian PPN/Bappenas. *Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.* 2016;102.
  10. Rusdiyanta, Pujiyono MSDB, Si M. Asymmetric policy of border area development in Indonesia (Joko widodo-jusuf kalla government period). *Int J Recent Technol Eng.* 2019;8(2 Special Issue 4):829–33.
  11. Vedung E. Policy Instruments: Typologies and Theories. In: Bemelmans-Videc ML, Rist RC, Vedung E, editors. *Carrots, Sticks and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation.* 6th ed. New York: Routledge; 2017. p. 21–58.
  12. Borrás S, Edquist C. *Holistic Innovation Policy: Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices.* 1st ed. Bemelmans-Videc ML, Rist RC, Vedung E, editors. Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press, UK; 2019.
  13. Howlett M. Policy instruments, policy styles and policy implementation. *Policy Stud J.* 1991;19(2):1–21.
  14. Schneider A, Ingram H. Behavioral Assumptions of Policy Tools. *J Polit.* 1990;52(2):510–29.
  15. Page E. Laws as an Instrument of Policy: A Study on Central-Local Government Relations. *J Public Policy.* 1985;5(2):241–65.
  16. Elmore RF. Instrument and Strategy in Public Policy. *Policy Stud Rev Autum.* 1987;7(1):174–86.
  17. Rochefort DA, Rosenberg M, White D. Community as a policy instrument: A comparative analysis. *Policy Stud J.* 1998;26(3):548–68.
  18. Nikola B, Žiljak T. Actor strategies and policy instruments within policy change model : One element of the complex solution. 2015.
  19. Howlett MP. *Designing Public Policies: Principles and Instruments.* 2nd ed. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group; 2019.
  20. Kochetkov GB, Supyan VB. Think Tanks in the USA: Science as an Instrument of Public Policy. *Stud Russ Econ Dev.* 2010;21(5):493–501.
  21. Metz F, Leifeld P, Ingold K. Interdependent policy instrument preferences: A two-mode network approach. *J Public Policy.* 2018;1–28.
  22. Todaro MP, Smith SC. *Economic Development.* [Internet]. 13th ed. Pearson. London & New York: Pearson Education Limited.; 2020. 1–846 p. Available from: <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
  23. Ashoer et al. *Ekonomi Pariwisata* [Internet]. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis; 2021. 254 p. Available from: [http://repository.usahid.ac.id/2428/1/buku\\_EKONOMI](http://repository.usahid.ac.id/2428/1/buku_EKONOMI)

PARIWISATA SUB.pdf

24. Wardiyanta. Pengantar Ekonomi Pariwisata [Internet]. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2020. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
25. Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S. *Tourism: principles and practice*. London: Pearson; 2018.
26. Lele G. Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. *Asian Polit Policy*. 2019;11(4):544–65.
27. Susanto SNH. Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Adm Law Gov J*. 2019;2(4):631–9.
28. Susila Wibawa KC. Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Adm Law Gov J*. 2019;2(3):400–12.
29. Tauda GA. Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Adm Law Gov J*. 2018;1(4):413–35.
30. Rusdiyanta, Rusdiyanta; Warella Y, Sri Suwitri HW. STRENGTHENING THE CAPACITY OF BORDER AND REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY LAG (BP2DT) IN WEST KALIMANTAN PROVINCE IN THE MANAGEMENT AREA OF LAND BORDER. *Int J Sci Engineering Res*. 2018;9(3):858–74.
31. Maulana D, Pujiyono B, Subiyakto R. Formulasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten. *J Adm Publik*. 2023;14(2).
32. Pujiyono B, Kismartini, Yuwono T, Dwimawanti IH. Stakeholder analysis on tourism collaborative governance in Tanjung Lesung tourism, Pandeglang Regency, Banten Province, Indonesia. *African J Hosp Tour Leis*. 2019;8(3).
33. Rusdiyanta. Penguatan Kapasitas Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BP2DT) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat [Internet]. Diponegoro; 2018. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7>
34. Rusdiyanta. Collaborative Border Management as the Strategic Revitalization of State Border Management in Indonesia. *Int J Pure Appl Math [Internet]*. 2017;116(Special Issue):415–26. Available from: <http://www.ijpam.eu>
35. Rusdiyanta R, Pujiyono B. Asymmetric Policy of Border Area Development in Indonesia (Joko Widodo-Jusuf Kalla Government Period). *Int J Pure Appl Math [Internet]*. 2017;117(15):945–54. Available from: <http://www.ijpam.eu>
36. Rusdiyanta. Strengthening of the Coordination of the National Agency for Border Management (BNPP) in Border Management in Indonesia. *Int J Appl Bus Econ Res*.

2017;15(18):515–20.

37. Rusdiyanta, Pujiyono B. The Pattern of Multilevel Coordination National Border Management Agency (Nbma) In Border Management Effectively in Indonesia. *J Ecohumanism* [Internet]. 2024;3(4):2161–8. Available from: <https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/3717>
38. Rusdiyanta, Subiyakto R, Pujiyono B. *Kebijakan Publik: Aktor, Model dan Proses*. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media; 2022.
39. Kismartini K, Pujiyono B. Collaborative management model tanjung lesung tourism in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia. *Geoj Tour Geosites* . 2020;30(2):868–74.
40. Kismartini K, Pujiyono B. Dynamic Capabilities in Collaboration Based Management of GeoPark in Bangka Belitung, Indonesia. *J Tour Dev*. 2023;41:79–94.
41. Creswell JW, Creswell JD. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Californian, London & Singapore: SAGE Publications Ltd; 2018.
42. Denzin NK, Lincoln YS. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Los Angeles, London, New Delhi: SAGE Publications Inc.; 2018.
43. Sugiyono. Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Prof Dr Sugiyono 2018 *Metod Penelit Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung Alf*. 2018;
44. Neuman WL. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Essex: Pearson Education Ltd.; 2013.
45. Lexy J. Moleong DMA. Moleong, Lexi J, 2014. ” *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”. Bandung : Remaja Rosdakarya. PT Remaja Rosda Karya. 2019;4(2):24.
46. Purwidyasari A. *Policy Brief: Desentralisasi Asimetris untuk Provinsi Kepulauan*. 2025;1–5.
47. Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan AN. *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuang RI. 2022;1–56.
48. Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasab Perbatasan Negara di Aruh, Motaain, dan Skouw*. 2021. p. 1–29.
49. BPS Kab. Sambas. *Kabupaten Sambas Dalam Angka*. 2025;34.